

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatera Barat atau yang dikenal dengan julukan Ranah Minang merupakan provinsi yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota yang berada di jalur Patahan Semangko. Patahan Semangko yang disebut juga dengan *Great Sumatran Fault* merupakan bentukan geologi yang membentang sepanjang 1.900 km (dari Aceh hingga Teluk Semangko di Selatan Lampung) tepat di antara pertemuan Lempeng Eurasia dan Indo-Australia (Edwiza & Novita, 2008; Rohadi, 2009). Dari 19 segmen Patahan Semangko, 7 di antaranya terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Segmen-segmen ini berpotensi menjadi sumber gempa daratan 6,8 skala Richter hingga 7,8 skala Richter (Setyahadi, Eko, Rinaldi, & Arif, 2019). Tidak hanya dilalui oleh lempeng, Provinsi Sumatera Barat juga dilalui oleh Jalur Pegunungan Mediterania yang di dalamnya terdapat banyak gunung berapi aktif, di antaranya Gunung Kerinci, Gunung Tandikat, Gunung Talang, Gunung Malintang, dan Gunung Merapi (Latief, 2012). Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2020, Provinsi Sumatera Barat memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 149,53 (IRBI BNPB, 2020).

Berdasarkan analisa pada data-data bencana gempa selama 200 tahun terakhir dapat diketahui aktivitas kegempaan di Sumatera Barat dengan Magnitudo tertinggi 8,5 SR hanya terjadi satu kali yaitu pada tahun 1861 dengan posisi geografis 97,8°BT dan 1°LS di laut pada kedalaman 70 Km (Natawidjaya, 2005). Selama kurun

waktu 200 tahun, gempa dengan magnitudo lebih dari 6 SR yang di rasakan di Sumatera Barat terjadi sebanyak 26 kejadian, diantaranya 23 kejadian berpusat di laut. Mekanisme fokal atau sumber pusat gempa, umumnya menunjukkan tipe sesar atau patahan naik. Sumber patahan seperti ini jika mempunyai magnitudo lebih besar dari atau sama dengan 7 SR sangat berpotensi sebagai pemicu tsunami (Mustafa, 2009).

Meskipun penyebab utama tsunami adalah gempa bumi, namun tidak semua gempa bumi mengakibatkan terjadinya tsunami. Karena ada empat syarat untuk terjadi sebuah tsunami, 1) Episenter berada di dasar laut, 2) Kekuatan gempa $> 6,5$ SR, 3) Kedalaman pusat gempa sangat dangkal (< 30 km), 4) Terjadi dislokasi batuan secara vertikal. Satu saja syarat tidak terpenuhi, maka otomatis tsunami tidak akan terjadi (Sumari, Nugroho & Addin, 2016). Salah satu bencana gempa tsunami yang pernah terjadi di wilayah sumatera seperti gempa dan tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004. Terjadi gempa besar dengan kekuatan 9,2 SR di utara pulau Simeulue yang kemudian diikuti oleh tsunami. Pusat gempa berada pada kedalaman 10 km (sangat dangkal), sehingga intensitasnya sangat besar, yang kemudian menimbulkan tsunami dan menelan korban yang sangat banyak lebih 250.00 jiwa melayang, banyak bangunan hancur, baik di pulau Simeulue maupun daerah daratan aceh (Mustafa, 2010).

Seperti halnya di pulau Simeulue, maka wilayah Sumatera Barat bagian kepulauan yaitu kepulauan Mentawai juga mempunyai potensi tsunami. BMKG menyatakan bahwa ada dua blok yang memiliki potensi terjadinya gempa besar, yaitu blok Sipora-Pagai dan blok Siberut. Natawijaya (2005) menyebut bahwa

kedua blok ini bisa jadi memiliki periode ulang yang terjadi sekitar 200 tahun. Gempa besar yang pernah terjadi pada periode 200 tahun lalu adalah di Siberut (tahun 1979 dengan kekuatan 8,7 SR) dan di Sipora-Pagai (tahun 1833 dengan kekuatan 8,4 SR), yang mengakibatkan kedua blok ini terjadi tsunami. Pada blok Sipora-Pagai, pernah terjadi gempa besar beberapa kali pada tanggal 12 dan 13 September 2007 dengan kekuatan 8,4 dan 7,9 SR, namun tidak menimbulkan tsunami. Kemudian baru pada tanggal 25 Oktober 2010 gempa besar di blok ini yang berpusat di barat daya pulau Pagai Selatan dengan kekuatan 7,2 SR menimbulkan tsunami yang memakan korban jiwa dan harta benda di pulau Pagai Selatan, Pagai Utara, dan Sipora (Mustafa, 2010).

Berbeda dengan blok Siberut, menurut Iwan Meilano (2011) blok Siberut masih dalam keadaan terkunci, sehingga energinya suatu waktu bisa terlepas dan menjadi gempa besar yang berpotensi tsunami. Jika kemungkinan gempa besar terjadi, gempa tersebut dapat diikuti oleh tsunami yang dapat berdampak pada kota-kota dan kabupaten di pesisir Sumatera Barat. Hal ini membuat masyarakat mulai memahami dan menyadari akan potensi gempa dan tsunami dapat terjadi di daerah lainnya (Latief, 2012). Sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tatanan geologi yang kompleks karena letaknya berada pada daerah tumbukan dua lempeng besar dan ditandai dengan adanya pusat gerakan tektonik di kepulauan Mentawai. Garis pantai dibagian sisi barat yang berbatasan dengan Samudera Hindia, daratan utama Sumatera Barat merupakan daerah yang rentan akan bencana, terutama bencana tsunami. Kabupaten dan kota di pesisir Sumatera Barat

yang berada disekitar ancaman tsunami termasuk kedalam wilayah padat penduduk disekitar pantai (Gersanandi, Subardjo & Anugroho, 2013).

Kota Padang merupakan salah satu daerah pesisir Sumatera Barat yang memiliki risiko tinggi terjadi gempa bumi dan tsunami. Menurut BPBD Sumatera Barat dalam 3 tahun terakhir ini Kota Padang mengalami peningkatan kejadian gempa dengan indeks peningkatan sebesar 0,866 yang termasuk pada kelas tinggi (BPBD Sumbar, 2019). Selama 15 tahun terakhir ini (2004-2017), Kota Padang telah mengalami 4 kali kejadian gempa bumi yang merusak, salah satunya adalah gempa bumi yang terjadi pada 30 September 2009 (Setiyono, 2018).

Kota Padang pernah diguncang gempa besar dengan kekuatan 7,9 SR pada tanggal 30 September 2009 sekitar pukul 17.16 WIB dan beberapa daerah lainnya yaitu Pariaman, Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan hingga Pasaman Barat. Berdasarkan data BPBD Kota Padang, peristiwa tersebut menelan korban jiwa sebanyak 383 orang, 431 orang luka berat, 771 orang luka ringan. Selain itu, gempa tersebut juga mengakibatkan banyaknya kerusakan fisik seperti rumah, tempat ibadah, sarana kesehatan, sekolah dan lainnya. Gempa bumi besar ini tidak hanya terjadi sekali di Provinsi Sumatera Barat, karena terdapat gempa bumi susulan pada tanggal 01 Oktober 2009 dengan magnitudo 6,8 SR yang berpusat di 46 km tenggara Kota Sungaipenuh, Provinsi Jambi, dan kedalaman 24 km (Zein, Nababan, Wahyudi, & Suryandari, 2014).

Berpedoman kepada data tsunami dan gempa dari BMKG, maka jumlah frekuensi terjadinya tsunami lebih kecil dibandingkan dengan gempa. Dengan demikian, tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan terjadinya tsunami seperti di

Aceh akan terjadi juga di Sumatera Barat. Akan tetapi masyarakat perlu mempersiapkan diri lebih baik agar kalau tsunami itu benar-benar datang, maka korban dapat diminimalisir. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam meminimalisir korban adalah dengan melakukan mitigasi bencana dengan sebaik-baiknya melalui sebuah koordinasi antar kelompok masyarakat dan instansi pemerintah, sambil melakukan sosialisasi mengenai gempa dan tsunami kepada seluruh lapisan masyarakat (Mustafa, 2010).

Melihat adanya potensi bencana gempa bumi besar di Kota Padang pemerintah gencar melakukan upaya pengurangan risiko bencana salah satunya adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Menurut Nick Carter (1991) mengemukakan konsep kesiapsiagaan dari suatu pemerintahan, suatu kelompok masyarakat atau individu adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi-organisasi, masyarakat, komunitas dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna, dimana tindakan kesiapsiagaan dapat berupa penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil. Kesiapsiagaan pada dasarnya merupakan semua upaya yang dilakukan sebelum kejadian bencana, kemudian secara cepat dan efektif merespon situasi/keadaan pada saat bencana dan segera setelah bencana. Upaya ini sangat penting dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam, termasuk korban jiwa, kerugian harta benda, serta kerusakan fasilitas umum dan lingkungan (Hidayati, 2008).

Pada penelitian Paramesti (2011) menemukan bahwa masyarakat belum banyak melakukan upaya peningkatan kesiapsiagaan karena kurang mengetahui

kerentanan atau bahaya wilayahnya. Raja, Hendarmawan, & Sunardi (2017) menyatakan apabila masyarakat tidak menyiapkan diri untuk menghadapi bencana maka tingkat risiko bencana juga semakin tinggi. Penelitian Prihatin (2018) menemukan bahwa pemahaman potensi dan risiko bencana serta kesadaran menentukan resistensi masyarakat dalam menghadapi bencana, kurangnya kesadaran biasanya dipengaruhi perspektif yang menerima bencana sebagai pemberian alam dan takdir. Selain itu, Xu, Peng, Liu, dan Wang (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana memiliki kesadaran relatif rendah akan kesiapsiagaan bencana. Hal tersebut dipengaruhi adanya karakteristik sosial, ekonomi, pendidikan, jarak dari lokasi bahaya, saluran informasi, dan struktur material tempat tinggal masyarakat.

Kesiapsiagaan bencana pada masyarakat pesisir di Indonesia masih tergolong rendah hingga sedang, meskipun wilayah tersebut rentan terhadap ancaman tsunami, banjir rob, dan badai (BNPB, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan mitigasi bencana sering kali hanya didasarkan pada pengalaman masa lalu, bukan pada pengetahuan sistematis (Syamsidik et al., 2019). Sebagai contoh, di Aceh, meskipun kesadaran akan tsunami meningkat pasca-2004, infrastruktur pendukung seperti jalur evakuasi dan sistem peringatan dini masih belum memadai. Sementara itu, studi di Jawa Timur mengungkapkan bahwa hanya 30% masyarakat yang memiliki rencana evakuasi keluarga, menunjukkan lemahnya perencanaan antisipatif (UNNES, 2021).

Faktor sosial-ekonomi turut memengaruhi ketidaksiapan masyarakat, di mana kelompok berpendapatan rendah kesulitan membangun rumah tahan bencana atau menyiapkan logistik darurat (BRIN, 2023). Selain itu, program pemerintah seperti Desa Tangguh Bencana (Destana) belum merata implementasinya, sehingga banyak wilayah pesisir yang belum mendapat pelatihan dan simulasi berkala. Di Sulawesi Tengah, misalnya, minimnya edukasi mitigasi menyebabkan respons masyarakat cenderung reaktif alih-alih proaktif (BRIN, 2022). Tantangan lain meliputi keterbatasan anggaran daerah untuk mitigasi dan budaya menyepelekan ancaman hingga bencana benar-benar terjadi.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, diperlukan pendekatan holistik melalui edukasi berkelanjutan, simulasi evakuasi rutin, dan pemanfaatan teknologi sederhana seperti aplikasi peringatan dini. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal juga penting untuk membangun ketangguhan berbasis masyarakat. Sagala, Kusumawati, Sitinjak, dan Krishna (2015) menyatakan empat hal dalam meningkatkan kepekaan terhadap bencana yaitu kesadaran akan potensi bahaya, kerjasama dengan pemerintah daerah, ketersediaan peralatan informasi bencana, dan kerjasama instansi atau komunitas dengan pemerintahan. Ketika individu melakukan persiapan, individu dapat merasa lebih tenang, mampu menghadapi situasi bencana, lebih stabil perasaannya, dan mampu mengatasi situasi bencana yang akan datang (Zulch, 2019).

Kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan bencana dapat meningkatkan tindakan individu dalam melindungi dan menyelamatkan diri dari bahaya bencana (Devi & Sharma, 2015). Kesiapsiagaan mempunyai empat komponen yang

dijadikan parameter dalam mengevaluasi kesiapsiagaan bencana gempa bumi, komponen tersebut yaitu: pengetahuan dan sikap tentang resiko bencana gempa bumi, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya (Rahmawati, 2016).

Menurut Goleman (1996) seseorang yang memiliki kesadaran diri yang baik dapat memahami situasi sosial, memahami orang lain, serta memahami harapan orang lain terhadap dirinya. Kesadaran diri sangat bermanfaat untuk merefleksikan diri, menggali pengalaman, mengamati, dan juga mengendalikan emosi. Goleman menjelaskan dalam bukunya kecerdasan emosional bahwa kesadaran diri atau *self-awareness* adalah suatu perhatian terhadap keadaan hati atau batin seseorang yang akan berguna untuk merefleksikan diri, pikiran, mengamati dan menggali perasaan terhadap dirinya sendiri. Kesadaran diri akan muncul dan hilang dalam diri seseorang berdasarkan peristiwa atau suatu kondisi yang sedang dialami. Reber (2010) menyampaikan dalam bukunya seseorang yang mampu menjaga kesadaran diri akan mudah dalam menempatkan diri, mudah menerima keadaan atau situasi dan memaksimalkan potensi di dalam lingkungannya. Dari definisi di atas dikatakan bahwa *self-awareness* adalah bagaimana seseorang dapat memiliki kesadaran untuk dirinya sendiri dalam memotivasi, mengatur emosi, percaya diri, serta membawa keyakinan tentang dirinya agar tanggap terhadap lingkungan sekitar.

Kesadaran diri (*self-awareness*) masyarakat menjadi sikap yang sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang tangguh dan peka terhadap bencana. Akan tetapi, kenyataan yang ditemui di lapangan adalah

minimnyakesadaran diri (*self-awareness*) dari masyarakat, sehingga bencana yang terjadi sewaktu-waktu dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitar (Putra, 2011).

Self-awareness atau kesadaran diri berperan penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana pada masyarakat. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang risiko bencana di sekitarnya, ia cenderung lebih waspada dan mengambil tindakan preventif. Misalnya, masyarakat yang menyadari bahwa mereka tinggal di daerah rawan gempa akan lebih mungkin menyiapkan tas darurat, mempelajari jalur evakuasi, atau mengikuti pelatihan mitigasi. Sebaliknya, rendahnya *self-awareness* sering kali membuat orang mengabaikan ancaman bencana, bahkan ketika informasi peringatan sudah tersedia. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran diri seseorang terhadap risiko bencana, semakin tinggi juga kesiapannya menghadapi situasi darurat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari membangun *self-awareness* melalui edukasi, simulasi, dan kampanye yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Kesadaran masyarakat akan pengetahuan dan sikap tentang bencana, yaitu penduduk di kawasan pesisir yang berada di sebuah daerah yang rawan gempa dan tsunami, akan dapat mengenali karakteristik bahaya gempa tsunami, dan tahu bagaimana bertindak jika gempa dan tsunami terjadi di kawasan mereka. Serta rencana tanggap darurat terkait bagaimana masyarakat bereaksi terhadap kemungkinan bencana yang dapat terjadi di daerahnya dan lingkungannya.

Oleh karena itu, merujuk pada penjelasan di atas, kesadaran diri membuat seseorang tanggap terhadap lingkungannya. Serta tentang kesadaran masyarakat akan kesiapsiagaan bencana dimana penduduk di kawasan pesisir berada di sebuah daerah yang rawan gempa dan tsunami. Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hubungan positif antara *self-awareness* dengan kesiapsiagaan bencana pada masyarakat di pesisir pantai Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijabarkan maka didapatkan rumusan masalah apakah terdapat hubungan antara *self-awareness* dengan kesiapsiagaan bencana pada masyarakat di wilayah pesisir Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian ini untuk melihat hubungan antara *self-awareness* dengan kesiapsiagaan bencana pada masyarakat di wilayah pesisir Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan memiliki kebermanfaatan bagi semua pihak, khususnya bagi peneliti, intelektual kebencanaan, psikolog maupun yang terkait dengan lainnya, serta pengembangan keilmuan secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan pada umumnya mengenai *self-awareness* dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami.

- b. Dapat menjadi referensi tambahan apabila diadakan penelitian lebih lanjut mengenai kebencanaan dan aspek individu terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini bagi beberapa pihak lain, seperti:

- a. Masyarakat

Pada masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai keterikatan masyarakat terhadap kondisi individu mereka dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi yang mungkin sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah mereka. Sehingga hal tersebut dapat membantu dalam mengurangi risiko dan dampak bencana serta dalam melakukan upaya pemulihan lebih secara cepat dan tepat.

- b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, instansi, organisasi serta komunitas terkait bencana gempa bumi.

Pada lembaga atau instansi, organisasi atau komunitas terkait bencana gempa bumi dalam melakukan penanggulangan bencana diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan sosialisasi ataupun aksi tanggap bencana terutama pada masyarakat di daerah yang rawan menjadi pusat bencana.

- c. Penelitian selanjutnya

Pada penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan menunjang penelitian selanjutnya terkait penelitian

mengenai kesiapsiagaan bencana dan keterikatan dengan kesadaran diri (*self-awareness*) dalam kebencanaan maupun lingkungan.

